



LAPORAN KINERJA (LKJ)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2022



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG
JL. DRS. WARSITO NO. 76, TELUK BETUNG UTARA
BANDAR LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2022 merupakan informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2022.

Laporan ini selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 juga dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk penyusunan evaluasi dan pencapaian rencana kerja tahun selanjutnya.

Laporan Penyelenggaraan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja untuk terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2022.

Bandar Lampung, 17 Maret 2023

Kepala Dinas,



Ir. Liza Dorni, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680812 199903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFRAT ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan..	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.5 Struktur Organisasi	4
1.6 Isu Strategis/Permasalahan	11
1.7 Sistematika	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana strategis 2019-2024	20
2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator	21
2.3 Indikator Kerja Utama	23
2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	30
3.1 Capaian Tujuan dan IKU	31
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	32
3.4 Akuntabilitas Pagu dan Realisasi Keuangan	44
3.5 Efektifitas dan Efisiensi.....	48
3.6 Prestasi dan Inovasi	49
3.7 TL LHE 2022	50
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	52

B A B I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung merupakan instansi Pemerintah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Pergub Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah *unsur pelaksana kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) dalam bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.*

1.2. Dasar Hukum

Laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
15. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
16. SK IKU pada Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 902/10.a/V.19-Set.3/2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capai tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkungan Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan dapat berlagsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan peraturan presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;

2. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan didarat;
4. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
5. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
6. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
7. Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut urusan provinsi;
8. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
9. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
10. Pelayanan administratif; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi sebagaimana Pergub Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Pergub Nomor 35 tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, membawahi:
 - 1) Seksi Tata Ruang,
 - 2) Seksi Jasa Kelautan dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan
 - 3) Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
4. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
 - 2) Seksi Penangkapan Ikan dan Kenelayanan; dan

- 3) Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
5. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
 - 2) Seksi Pengendalian Kesehatan, Pakan dan Obat Ikan; dan
 - 3) Seksi Penguatan Daya Saing.
6. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan,
 - 2) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; dan
 - 3) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari :
 - 1) UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
 - 2) UPTD Perbenihan Ikan Kelas A;
 - 3) UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Kelas A;
 - 4) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Meringgai dan Teladas Kelas A;
 - 5) UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung Kelas A;

Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yaitu :

1. Kepala Dinas
 - a) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
 - b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha

pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang

2. Sekretariat

- a) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan teknis administrasi umum, organisasi, tata laksana, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas bidang.
- b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
 - b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, tata laksana, perlengkapan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut
- a) Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pertimbangan teknis pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, jasa kelautan, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan keanekaragaman hayati.
 - b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pertimbangan teknis dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil;
 - d. Membentuk unit layanan pengelolaan kawasan konservasi pada lokasi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan ruang laut; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

4. Bidang Perikanan Tangkap
 - a) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, kenelayanan, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan, penerbitan pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (Lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
 - b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan perikanan tangkap;
 - b. Pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan monitoring perikanan tangkap;
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

5. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing
 - a) Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang budidaya perikanan dan penguatan daya saing, produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
 - b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing mempunyai Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing. Produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan monitoring di perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelanjutan dan perikanan;

- d. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan, industrialisasi pengolahan perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.
6. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- a) Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
 - b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, penyiapan dan pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan operasi pengawasan dan penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan;
 - f. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan IUU-Fishing dan Destructive Fishing.
 - g. membentuk dan membina gugus tugas lapangan dengan melibatkan unsur dinas perikanan Kabupaten/Kota atau yang membidangi.
 - h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.

Jenis pelayanan yang menjadi tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sesuai amanat Pasal 594 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang UPTD tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung, yaitu :

- a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
- b. penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
- c. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan di darat;
- d. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
- e. pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
- f. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefasifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
- g. pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut

diwilayah laut urusan provinsi;

- h. pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
- i. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- j. pelayanan administrative
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

Adapun kelompok sasaran yang menjadi tanggungjawab pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dunia usaha perikanan, LSM, dan kelompok *stakeholder* lainnya.

1.6 Isu Strategis/Permasalahan

1.6.1 Ruang Lingkup

Lingkungan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, adalah sebagai salah satu unsur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada lingkungan organisasi Provinsi Lampung dalam Bidang Kelautan dan Perikanan, dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Analisis Lingkungan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dilaksanakan secara objektif dan *komprehensif* untuk dievaluasi, diolah, serta diformulasikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak terlepas dari organisasi pemerintah daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan penelaahan data dan rangkuman isu/permasalahan, diidentifikasi beberapa permasalahan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Terjadinya wabah COVID-19 di dunia juga berdampak disektor kelautan dan perikanan, antara lain sebagai berikut :
 - a) Penurunan permintaan produk ekspor hasil perikanan Provinsi Lampung, sehingga menyebabkan Stock Produk di Unit Pengolahan Ikan (UPI) menumpuk.
 - b) Penurunan permintaan hasil produksi perikanan baik pasar di pasar lokal maupun luar daerah, hal ini disebabkan terutama penurunan daya beli masyarakat, pembatasan kegiatan pemasaran, kegiatan pertemuan, dan penerapan pembatasan akses masuk kedaerah lain.
 - c) Menurunnya permintaan berimbas pada berkurangnya siklus produksi pembudidaya ikan dan pada akhirnya produksi perikanan secara umum.
 - d) Penerapan "pembatasan sosial" juga berpengaruh pada penyediaan sarana budidaya (benih dan pakan) dan jalur distribusinya.
2. Dukungan sektor kelautan dan perikanan dalam Program Kartu Petani Berjaya masih belum optimal, baik dari sisi integrasi program, menu dalam aplikasi maupun

kepesertaan pelaku utama kelautan dan perikanan dalam Program KPB.

3. Dinamika/perubahan kebijakan terkait sektor kelautan dan perikanan di Pusat, dengan adanya UU Cipta Kerja, pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan menyebabkan dinamika dalam kebijakan, program dan kegiatan kelautan dan perikanan yang perlu disesuaikan oleh daerah.
4. Trend nilai tukar pembudidaya (NTPi) di Provinsi Lampung masih dibawah 100, hal ini mengindikasikan kegiatan perikanan budidaya secara umum belum memberikan keuntungan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.
5. Penataan kawasan tambak yang masih terbatas, persoalan pengelolaan kawasan tambak baik intensif maupun tradisional yang tidak optimal, penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan serta ancaman serangan penyakit.
6. Masih sangat sedikit kapal perikanan di Provinsi Lampung yang memiliki perizinan (5% dari 10.121). Kondisi ini terutama disebabkan pengurusan dokumen kapal yang melibatkan instansi lain (KSOP) memiliki SDM yang bertugas mengukur kapal hanya 2 (dua) orang untuk 1 (satu) Provinsi Lampung.
7. Penataan perizinan dan pemanfaatan alokasi ruang laut yang masih menemui beberapa kendala antara lain masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk mengurus perizinan, perkembangan alokasi dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana awal.
8. Penambahan kewenangan provinsi berdasarkan UU 23/2014 dibidang kelautan dan perikanan tidak didukung dengan penambahan alokasi anggaran, SDM dan sarana prasarana yang memadai, terutama dalam aspek pengawasan SD Kelautan dan Perikanan.
9. Penerapan sistem rantai dingin dalam menjaga mutu hasil perikanan belum optimal. Keterbatasan kewenangan dan anggaran Pemerintah Provinsi, sarana dan prasarana yang belum mendukung dan tidak terintegrasi.
10. Permasalahan sampah pesisir harus dikelola dan diselesaikan secara komprehensif, menyeluruh mulai dari mengurangi sumber sampah (pencemaran) dan penanganannya diwilayah pesisir, melibatkan seluruh stakeholder terkait.
11. Kondisi stagnan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung karena keterbatasan anggaran dan belum jelasnya status peralihan P3D aset-aset pelabuhan yang sebelumnya dibangun dan dikelola oleh kabupaten/kota.

Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019-2024 yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu Program Nelayan Berjaya, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan:

- a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan.
- b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
- c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan.
- d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi.
- e. SPBU untuk Nelayan. Mendirikan Stasiun-stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra pertambakan

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta program dan kegiatan yang ada dimasing – masing bidang dan UPTD, maka Dinas Kelautan dan Perikanan secara khusus akan mendukung pencapaian Misi ke 5 Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan serta Misi ke 6 Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-5, dilakukan melalui Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya komoditas perikanan melalui program subsidi, fasilitasi pemasaran dan peningkatan mutu, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan sarana dan prasarana serta Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), dan menata kawasan yang sudah ada untuk keberlanjutan usaha. Sedangkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-6, dilakukan melalui Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan, dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) khususnya Tujuan ke 14, Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan alokasi ruang laut yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup serta didukung pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kekuatan sekaligus kelemahan yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dimana tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah “sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah

dibidang Kelautan dan Perikanan”, yang secara sistematis dapat diuraikan analisis lingkungan strategis (kekuatan dan kelemahan) sebagai berikut :

- 1) Kekuatan (*Strength*)
 - a. Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar dan posisi geografis yang strategis
 - b. Dukungan regulasi kelautan dan perikanan yang ada, al: Perda RZWP3K, Perda Perlindungan Nelayan.
 - c. Masuk dalam prioritas 33 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2024.
 - d. Dukungan anggaran yang sudah ada (APBN dan APBD)
 - e. Keberadaan 3 UPT Pusat untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung
 - f. Terbentuknya kelembagaan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB)
 - g. Program Kartu Petani Berjaya sebagai ekosistem Pelaku Utama sektor Pertanian secara umum.
- 2) Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Terbatasnya sarana, prasarana, dan anggaran pemerintah
 - b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik aparatur maupun pelaku usaha
 - c. Lemahnya data kelautan dan perikanan serta informasi akses pasar
 - d. Lemahnya aplikasi teknologi budidaya terkini, efisiensi pakan dan penerapan standar CBIB.
 - e. Rendahnya mutu hasil perikanan khususnya perikanan tangkap.
 - f. Pengurusan dokumen perikanan kapal masih tergantung pada intitusi lain (KSOP)
 - g. Lemahnya pemanfaatan bioteknologi / potensi kelautan non konsumsi
- b. Lingkungan Eksternal (Peluang dan Ancaman)
 - 1) Peluang (*Opportunities*)
 - a. Berkembangnya sistem teknologi informasi dan industri 4.0, termasuk teknologi perikanan.
 - b. Akses pasar bebas masyarakat ekonomi Asean
 - c. Berkembangnya permintaan produk non konsumsi dan ekspor ikan hias
 - d. Pengembangan kawasan konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

- e. Perubahan / Dinamika regulasi di level pusat.
 - f. Pengembangan budidaya lobster dan komoditas ekonomis bernilai tinggi lainnya.
- 2) Hambatan/Ancaman (*Threats*)
- a. Pandemi Covid 19 masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan dan berdampak dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Penurunan permintaan hasil produksi perikanan terutama disebabkan penurunan daya beli masyarakat, dan pembatasan kegiatan.
 - c. Perlambatan ekonomi global, penurunan permintaan ekspor.
 - d. Serangan penyakit dan penurunan daya dukung lingkungan.
 - e. Perubahan Iklim
 - f. IUU Fishing
 - g. Pencemaran dan sampah pesisir
 - h. Adanya konflik kepentingan
 - i. pemanfaatan ruang laut

1.6.2 Sumber Daya Manusia

Pembinaan kepegawaian dan organisasi dilakukan dengan upaya melaksanakan kebijakan operasional yang ditetapkan, khususnya yang menyangkut pembinaan sumberdaya manusia (SDM) dan peningkatan profesionalisme SDM aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

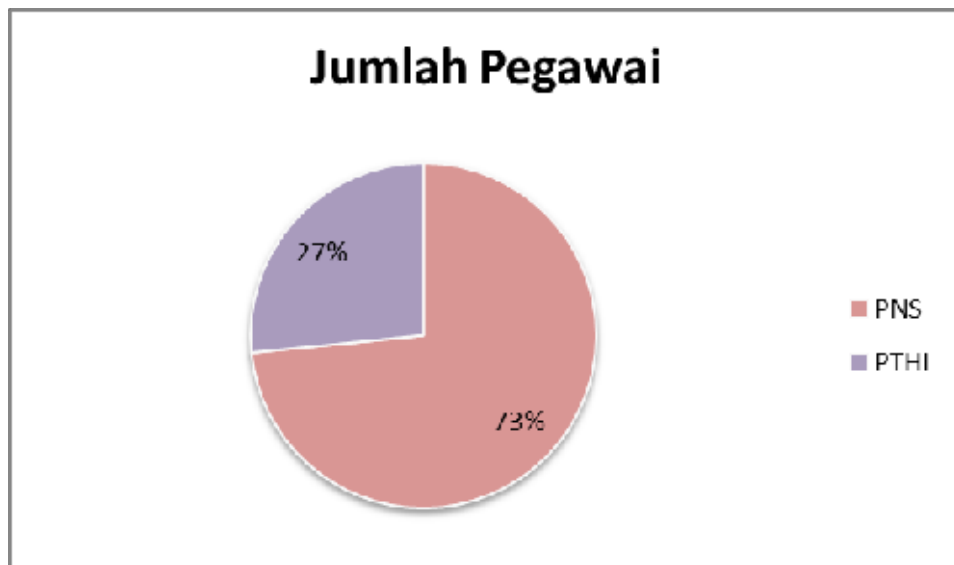
Perkembangan kekuatan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung saat ini belum seimbang antara jumlah staf untuk masing-masing bidang/UPTD, di lain pihak kualitas staf yang melekat pada bidang/UPTD masih kurang memadai, sehingga pembinaan dan target pelayanan prima yang ingin diberikan kepada masyarakat cenderung belum terpenuhi secara maksimal. Berikut ini gambaran jumlah personil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sampai dengan Desember 2021.

Tabel 1. Komposisi SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
(keadaan : 12 Januari 2023)

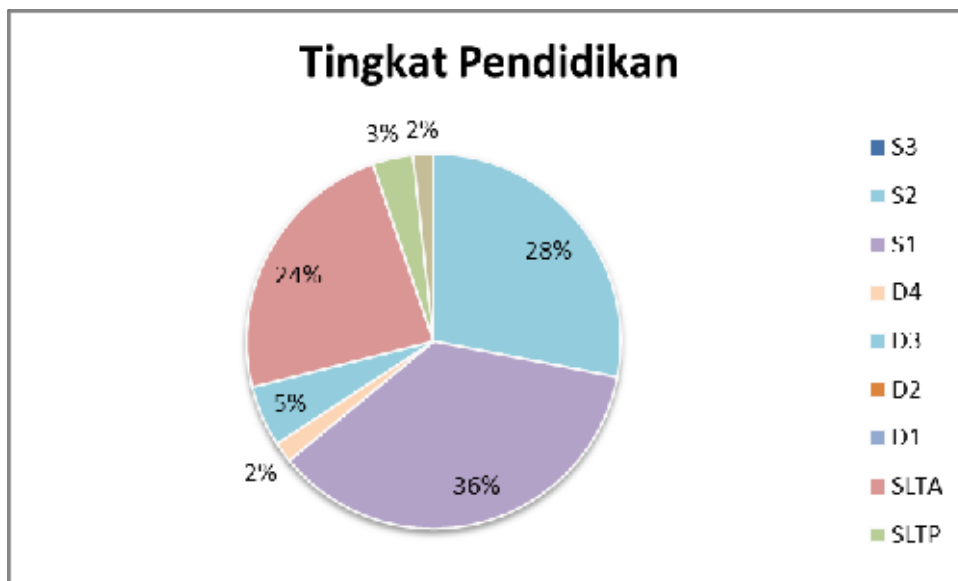
JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT (orang)	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 116	S3 : -	IV/d : -	Ess IV a = 17	JFT : 29
L : 73	S2 : 34	IV/c : 1	Ess III a = 5	Pelaksana : 59
P : 43	S1 : 41	IV/b : 5	Ess III b = 5	
	D4 : 2	IV/a : 22	Ess II a = 1	
PTHL : 42	D3 : 6	III/d : 32		
L : 27	D2 : -	III/c : 9		
P : 15	D1 : -	III/b : 15		
	SLTA : 27	III/a : 13		
	SLTP : 4	II/d : 8		
	SD : 2	II/c : 5		
		II/b : 3		
		II/a : -		
		I/d : 2		
		I/c : 1		
		I/b : -		
		I/a : -		

Grafik 1. Komposisi SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (keadaan : 12 Januari 2023)

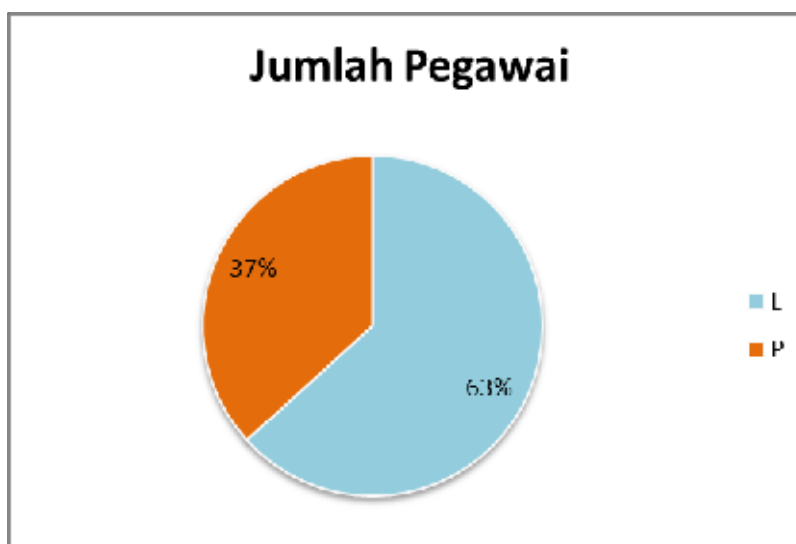
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Grafik 2. Komposisi Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik 3. Komposisi Pegawai PNS dan THL Berdasarkan Jenis Kelamin



1.6.3 Sarana dan Prasarana

Aset-aset pendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang dimiliki dinas baik yang terinventarisir sebagai aset bergerak maupun tidak bergerak dan aset kearsipan. Aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut :

Aset-Aset Pendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung :

1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau Pelabuhan Perikanan Type A berdasarkan PERGUB No.10 Tahun 2020, Provinsi Lampung memiliki 4 (empat) PPP berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 12 Tahun 2004 yaitu :

- (1) PPP Lempasing di Kota Bandar Lampung

- (2) PPP Kota Agung di Kabupaten Tanggamus,
 - (3) PPP Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur
 - (4) PPP Teladas di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) di Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur didukung oleh Balai Benih Ikan Lokal serta Dempond, Demplot yang tersebar di 14 Kab/Kota.
 3. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
 4. Laboratorium Pengujian Mutu Benur
 5. Kawasan Konservasi Laut Daerah – Taman Pesisir Ngambur
 6. Pasar Ikan Hygienis
 7. Sentra Pengolahan Ikan
 8. Balai Budidaya Laut (UPT Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)
 9. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPMN) Kota Agung (Sekolah kejuruan perikanan milik BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)
 10. Stasiun Karantina Ikan Kelas I Lampung (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)
 11. Sarana operasional berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua

Tabel 2. Daftar Aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	Gedung Kantor/Tanah			
	Gedung Kantor	129	B	Sekretariat dan UPTD
	Tanah	42	B	
2	Kendaraan			
	Kendaraan Roda Empat	21	B	Operasional Dinas
	Kendaraan Roda Dua	35	B	
	Kapal Patroli	2	B	Perlu perawatan
	Kapal Wisata Lampung Ship	1	B	Perlu Perawatan
3	Peralatan kantor	2978	B	Sarpras operasional Dinas dan UPTD

Catatan : Data berdasarkan Aplikasi Simada TA. 2022

1.7 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Tahun 2021 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Landasan Hukum, dan Sistematika.

BAB II Perencanaan Kinerja

Meliputi Perubahan Renstra 2019 – 2024

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi Karangka Pengukuran Kinerja, Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan T.A 2021.

BAB IV Penutup

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan 2019 – 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2019-2024.

2.1 Perubahan Rencana Strategis 2019 – 2024

A. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan RENSTRA-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Untuk mewujudkan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2019 – 2024 maka terdapat beberapa misi untuk mendukung program kerja Gubernur Visi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019 – 2024), yaitu : "*Rakyat Lampung Berjaya*"; dengan 6 misi pembangunannya yaitu :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Selain itu dalam Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019 – 2024 yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu Program

Nelayan Berjaya, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan :

- a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan.
- b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
- c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia.
- d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi.
- e. SPBU untuk Nelayan. Mendirikan Stasiun-stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra pertambakan.

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan UPTD, maka Dinas Kelautan dan Perikanan secara khusus akan mendukung pencapaian Misi ke 5 Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan serta Misi ke 6 Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-5, dilakukan melalui Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya komoditas perikanan melalui program subsidi, fasilitasi pemasaran dan peningkatan mutu, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan sarana dan prasarana serta Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), dan menata kawasan yang sudah ada untuk keberlanjutan usaha. Sedangkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-6, dilakukan melalui Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan, dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) khususnya Tujuan ke 14, Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan alokasi ruang laut yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup serta didukung pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator

Mengacu kepada Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024 dan analisis isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang telah ditetapkan, maka

tujuan yang hendak dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

Tabel 2.1 Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

No.	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (RENSTRA Perubahan)	Sasaran (RENSTRA Perubahan)	Indikator Sasaran
1.	Rakyat Lampung Berjaya	(5) Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan
				Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan
		(6) Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama	Meningkatkan Indeks Kualitas air Laut	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Pencapaian Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target Capaian Indikator Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan (Sasaran RPJMD)	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Baseline Data (2019)	Target Capaian Indikator Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Perdesaan yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan								
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	303.423	100 (343.602)	100 (380.149)	100 (313.458)	100 (329.131)	100 (354.884)
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	18.054	100 (18.750)	100 (19.859)	100 (18.361)	100 (19.279)	100 (20.725)
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama								
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	NA	80	85	90	95	100

2.3 Indikator Kinerja Utama

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai tugas Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
2. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan *eradikasi* penyakit ikan didarat;
4. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
5. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan Provinsi;
6. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
7. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
8. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
9. Pelayanan administratif.

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA	SUMBER DATA	KET
1	Prosentase Produksi Perikanan	%	Dihitung berdasarkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dalam 1 tahun dibagi dengan Target Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dikali 100 persen.	Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan	
2	Prosentase Ekspor Perikanan	%	Dihitung berdasarkan Jumlah/Volume Ekspor Produk Perikanan dalam 1 tahun dibagi dengan Target Jumlah/Vokume Ekspor Produk Perikanan dikali 100 persen.	- Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung. - Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung.	
3	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	Dihitung berdasarkan Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut dan/atau mengajukan perizinan yang sesuai dengan alokasi pemamfaatan ruang laut berdasarkan Perda RZWP3K dibagi dengan Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut yang ada dan/atau mengajukan perizinan pemanfaatan ruang laut dikali 100 persen.	- Bidang Pengelolaan Ruang Laut - Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	

2.4 Perubahan PK (PPK) Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan hasil reuiu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui program/kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ir. LIZA DERNI., M.M**
Jabatan : **KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ARINAL DJUNAI DI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI DI

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG,

LIZA DERNI., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19680812 199903 2 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Prosentase Produksi Perikanan	100 %
2.	Meningkatnya Ekspor Produk Hasil Perikanan	Prosentase Ekspor Perikanan	100 %
3.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Alokasi Ruang Laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Patuh Kepada Alokasi Pemanfaatan Ruang	90 %

<u>Program/Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. <u>19.599.159.048</u>	P-APBD
2. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. <u>1.487.960.000</u>	P-APBD
3. Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. <u>18.139.536.000</u>	P-APBD
4. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. <u>8.039.350.000</u>	P-APBD
5. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp. <u>1.356.940.000</u>	P-APBD
6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. <u>3.363.000.000</u>	P-APBD
Total Anggaran	Rp. <u>51.985.945.048.-</u>	P-APBD

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,


ARTINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,


Ir. LIZA DERNI, M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP.19680812 199903 2 003

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberian amanah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pncapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri 86/2017)

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran hasil maupun dampak.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masingmasing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No.86 tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Skala Nilai peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori/Interpretasi	Kode Warna
1	$90 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

3.2 Capaian Tujuan Dan IKU

a. Indikator Kinerja Utama Renstra Perubahan Tahun 2019-2024

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Lampung.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2022, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor: 902/16.a/V.19-Set.3/2022 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 telah ditetapkan tiga indikator kinerja utama. Hasil Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2.3 Tabel Indikator Kerja Utama

Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Sasaran OPD	Indikator sasaran	Target Capaian Indikator Sasaran 2022	Realisasi (Januari – Desember 2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan				
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	100 (329.131,54 ton)	100,5 (330.673,22) *angka sementara
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	100 (19.279,418 ton)	106,5 (20.525,48 ton)
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama				
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	90	100

Indikator Kinerja 1 yaitu jumlah produksi perikanan dari target tahun 2022 sebesar 329.131,54 ton sudah tercapai 330.673,22* ton (100,5%) dengan produksi perikanan budidaya sebesar 171.054,31* ton (100,8% dari target) dan produksi perikanan tangkap sebesar 159.618,91* ton (100,1% dari target) berdasarkan angka sementara dari Satudata Kementerian Kelautan dan Perikanan Januari – Desember 2022 (*angka sementara).

Indikator Kinerja 2 yaitu jumlah ekspor perikanan dari target tahun 2022 sebesar 19.279,418 ton tercapai 20.525,48* ton (106,5%) berdasarkan data dari Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Provinsi Lampung Per Desember Tahun 2022.

Indikator Kinerja 3 yaitu persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang, sebesar 100% telah mengajukan rekomendasi perizinan. Target indikator kinerja berupa jumlah pelaku usaha yang mengajukan rekomendasi perizinan dari Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP).

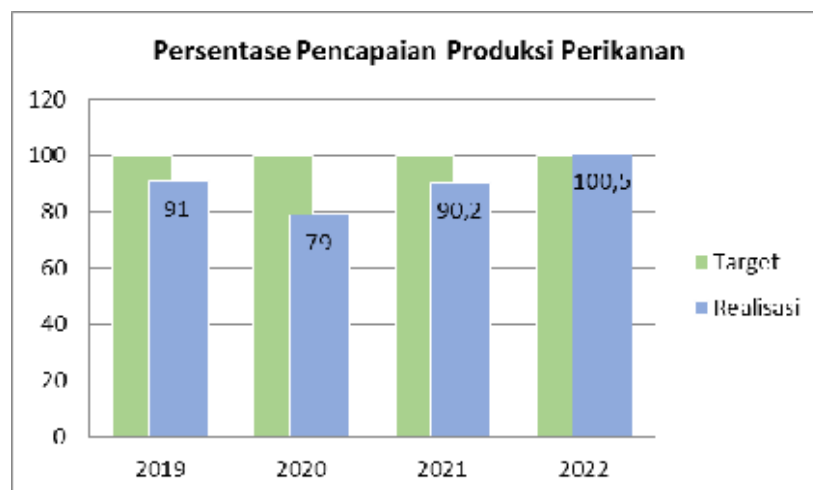
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Jumlah tujuan dalam Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak tiga tujuan dengan empat indikator tujuan. Apabila dilihat pencapaian berdasarkan misi dan kategori pengukuran kinerja adalah sebagai berikut

Tabel 3.3.1 Capaian target IKU per Misi berdasarkan Pengukuran Kinerja Permendagri 86/2017

Misi	Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan											
Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya											
Sasaran	Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya											
IKU	Presentase (Pencapaian) Produksi Perikanan											
Satuan	Tahunan											
	2019			2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	100	91	91	100	79	79	100	90,2	90,2	100	100,5*	100,5

Sasaran meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya memiliki 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu presentase (pencapaian) produksi perikanan dengan capaian sebesar 100,5% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022. Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam 1 tahun yaitu 330.673,22* ton (*angka sementara berdasarkan Satudata Kementerian Kelautan dan Perikanan) dibagi target produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yaitu 329.131,54 ton dikali 100 persen.



Gambar 3.3.1 Persentase Pencapaian Produksi Perikanan 2019 – 2022

(Sumber Data: Satudata KKP RI)

Pencapaian produksi perikanan pada tahun 2019 mencapai 91% dari target sebesar 100% yang telah ditetapkan, namun menurun pada tahun 2020 yang disebabkan oleh awal pandemi COVID-19, dan adanya pembatasan kegiatan dalam rangka pengendalian COVID-19 sehingga produksi ikan tidak terserap sepenuhnya. Pada tahun 2021 hingga 2022, pencapaian produksi perikanan terus mengalami tren perbaikan, sehingga dapat mencapai realisasi sebesar 100,5% (330.673,22* ton) dari target di akhir tahun 2022 yaitu 329.131,54 ton. Komoditas perikanan tangkap yang menjadi unggulan diantaranya adalah ikan kembung, tongkol, selar, rajungan, teri dan cumi-cumi, sedangkan untuk perikanan budidaya, komoditas udang masih menjadi penyumbang terbesar, diikuti ikan lele, patin, nila dan gurame.



Gambar 3.3.2 Kegiatan IKU-1

Misi	Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan	
Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya	
Sasaran	Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya	
IKU	Presentase (Pencapaian) Produksi Perikanan	
Satuan	Tahunan	
	2024	
	Target	Nasional
	100	Realisasi 2021
	100,5*	100,1

Presentase (pencapaian) produksi perikanan pada tahun 2022 mencapai 100,5% dari target 100% pada tahun 2024 yang direncanakan dalam Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2019 – 2024. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi nasional tahun 2021 yaitu 100,1% berdasarkan data dari Satudata Kementerian Kelautan dan Perikanan. Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam 1 tahun yaitu 21.872.810,30 ton dibagi target produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yaitu 21.848.591,96 ton dikali 100 persen.

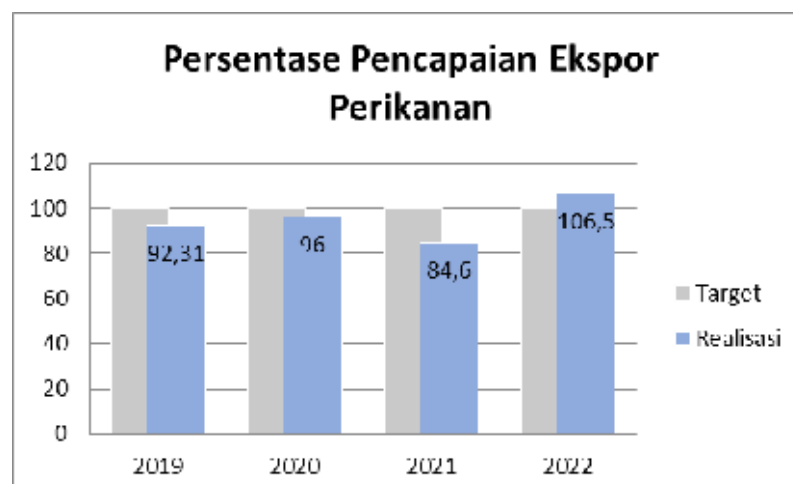
Tabel Program/kegiatan dan faktor pendukung/penghambat serta solusi:

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/Penghambat	Solusi	Aksi
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Bantuan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap TA. 2022 2. Asuransi Nelayan Berjaya Provinsi Lampung 3. Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) di Atas Kapal 4. Kegiatan Restocking (Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) 5. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan 6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 7. Pra Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Pembudidaya Ikan (Pra-Sehatkan). 8. Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya Mesin Pakan Ikan Apung 9. Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya Kolam Bulat/Bioflok Agropark 10. Bantuan Sarana dan Prasarana Pengembangan Budidaya Kerang Hijau 11. Bantuan Sarana Prasarana Budidaya	1. Jumlah nelayan yang dapat diakomodir oleh bantuan premi asuransi pemerintah sangat terbatas. 2. Ketersediaan stock benih ikan lokal yang terbatas, sehingga harus mendatangkan dari luar daerah.. 3. Masih banyak pelabuhan perikanan/ pusat pendaratan ikan yang dikelola oleh kab/kota belum diserahkan kepada Provinsi, disisi lain pengelolaan dan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan memerlukan dukungan anggaran yang sangat besar sehingga akan menjadi beban pemerintah provinsi. 4. Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari fasilitas	1. Keterbatasan BPJS tenaga kerja sebagai penyedia karena statusnya sebagai BUMN. 2. Mendorong nelayan untuk melanjutkan dengan asuransi mandiri bekerjasama dengan penyedia asuransi. 3. Mendorong dan memfasilitasi BBIS lokal untuk melakukan domestikasi ikan-ikan lokal seperti jelabat. 4. Mendorong dan memfasilitasi pembangunan Balai Budidaya Air Tawar di Kab. Mesuji yang akan dibangun oleh KKP. 5. Menyampaikan surat edaran dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas	1. Persiapan pelaksanaan kegiatan, sosialisasi pendaftaran dan penandaan kapal perikanan / asuransi nelayan dan pelaksanaan kegiatan 2. Persiapan kegiatan, verifikasi data, monitoring pembinaan dan pelaksanaan kegiatan 3. Persiapan dan survey lokasi perairan umum daratan, penyerahan prasarana usaha perikanan tangkap 4. Persiapan Pelaksanaan dan Penyediaan Bantuan Sarana Prasarana Operasional 5. Persiapan pelaksanaan, sosialisasi dan pelaksanaan

	<p>Keramba Jaring Apung Laut (KJA) Lobster</p> <p>12. Bantuan Pakan Ikan Buatan Unila</p> <p>13. Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Keramba Jaring Apung Laut</p> <p>14. Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber)</p> <p>15. Bantuan Kincir dan Alkon</p> <p>16. Bantuan Kolam Bulat/Bioflok kepada Pokdakan</p>	<p>pelabuhan perikanan yang ada.</p> <p>5. Teknologi pembenihan/ proses domestikasi ikan lokal yang relatif sulit.</p>	<p>Perikanan Kab/kota.</p> <p>6. Mengupayakan pembiayaan sarana dan prasarana pelabuhan melalui dana APBN / DAK dan Swasta.</p> <p>7. Memprioritaskan revitalisasi dan pembangunan fasilitas pokok pelabuhan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kenelayanan.</p> <p>8. Pembelajaran / pemagangan petugas BBIS Purbolinggo di BBAT Mandiingin, Kalimantan untuk mengupdate teknologi pembenihan ikan-ikan lokal (jelabat, belida, dsb).</p>	<p>bantuan</p> <p>6. Persiapan Pelaksanaan, penyediaan bantuan sarana prasarana, monitoring, pembinaan</p>
--	---	--	--	--

Misi	Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan											
Tujuan	Meningkatkan pertumbuhan PDRB subsector pertanian											
Sasaran	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan											
IKU	Prosentase (Pencapaian) Ekspor Perikanan											
Satuan	Tahunan											
	2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
100	92,31	92,31	100	96	96	100	84,6	84,6	100	106,5	106,5	

Sasaran meningkatnya daya saing produk hasil perikanan memiliki 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu presentase (pencapaian) ekspor perikanan dengan capaian sebesar 106,5% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022. Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah/volume ekspor perikanan dalam 1 tahun yaitu 20.525,48* ton (berdasarkan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung dan Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung) dibagi target produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yaitu 19.279,418 ton dikali 100 persen.



Gambar 3.3.3 Persentase Pencapaian Ekspor Perikanan 2019 – 2022

(Sumber: BKIPM dan BPS Lampung)

Persentase (pencapaian) ekspor perikanan mengalami fluktuasi (Gambar 3.3.2) pertahunnya jika dilihat pada grafik, pada tahun 2019 mencapai 92,31% dari target. Persentase pencapaian ekspor perikanan mengalami peningkatan pada tahun 2020, menandakan produk udang di Lampung masih sangat diminati negara luar. Sedangkan pada tahun 2021, pencapaian ekspor perikanan mengalami penurunan menjadi 84,6%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan ekspor di golongan barang daging dan ikan olahan yang turun dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, persentase mencapai target yaitu 106,5% berdasarkan data Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung dan Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung.

Tabel 3.3.2 Capaian Ekspor Tahun 2022 berdasarkan Media Pembawa

EKSPOR TAHUN 2022				
No	Media Pembawa	Volume	Nilai (Rp)	Frek
1	SHRIMP (Kgs)	12.111.226	1.685.071.018.604	990
2	CRAB (Kgs)	1.019.608	418.021.738.291	168
3	SQUID (Kgs)	815.765	58.819.382.019	97
4	FROZEN FISH (Kgs)	5.321.428	455.734.910.557	295
5	FROZEN SNAIL (Kgs)	50.140	4.300.908.920	2
6	DRIED SARGASSUM (Kgs)	1.207.316	8.875.885.246	33
7	LIVE GROUPER FISH (Hds)	40.000	2.220.000.000	1
Total Kgs		20.525.483	2.630.823.843.637	1.585
Total Hds		40.000	2.220.000.000	1
Grand Total			2.633.043.843.637	1.586

*Sumber: BKIPM dan BPS Lampung)

Komoditas yang paling banyak diekspor adalah udang, diikuti dengan kepiting dan rajungan, cumi – cumi, ikan beku, siput beku, rumput laut kering, dan kerapu hidup. Beberapa negara yang menerima ekspor hasil perikanan Lampung adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, Kanada, Belanda, Hongkong, Thailand, Italia, Jerman, Vietnam, Singapura, Prancis, Australia dan ada Timor Leste hingga Taiwan.



Gambar 3.3.4 Kegiatan IKU-2

Misi	Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan	
Tujuan	Meningkatkan pertumbuhan PDRB subsector pertanian	
Sasaran	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	
IKU	Prosentase (Pencapaian) Ekspor Perikanan	
Satuan	Tahunan	
	2024	Nasional
	Target	Capaian 2022
	100	106,5
		Realisasi 2022
		86,9

Presentase (pencapaian) ekspor perikanan pada tahun 2022 mencapai 106,5% dari target 100% pada tahun 2024 yang direncanakan dalam Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2019 – 2024. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi nasional tahun 2022 yaitu 86,9% berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Angka tersebut dihitung berdasarkan realisasi nilai ekspor hasil perikanan dalam 1 tahun yaitu US\$6,2 miliar dibagi target nilai ekspor hasil perikanan nasional US\$7,13 miliar dikali 100 persen.

Tabel Program/kegiatan dan faktor pendukung/penghambat serta solusi:

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/Penghambat	Solusi	Aksi
1. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Hibah Sarana Rantai Dingin (<i>Chest freezer</i> dan <i>Cool Box</i>) 2. Hibah Sarana Prasarana Pengolahan (<i>Vacum Sealer</i>) 3. Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung juga menjangkau hingga Provinsi Sumatera Selatan melalui layanan Sertifikasi SPPT SNI Produk Olahan Hasil Perikanan UMKM yang diberikan Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (LS Pro	Masih kurangnya inisiatif UMKM Pengolahan hasil perikanan untuk memenuhi sertifikasi SNI	1. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM Pengolahan hasil perikanan 2. Kolaborasi dengan BSN dan stake holder terkait untuk memfasilitasi proses sertifikasi	1. Pelaksanaan Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kot a dalam 1 (satu) daerah provinsi 2. Persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, Evaluasi mutu dan keamanan 3. Persiapan Pelaksanaan, pelaksanaan, Bimbingan dan penerapan

	HP) UPTD Laboratorium Penerapan Mutu Hasil Perikanan. UPTD LPMHP merupakan satu- satunya Lembaga Sertifikasi Produk di wilayah Sumatera yang telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012 sejak tahun 2018 dengan nomor Akreditasi : LSPR-064-IDN.			persyaratan standar usaha pengolahan dan skala menengah dan besar
--	--	--	--	--

Misi	Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama											
Tujuan	Meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut											
Sasaran	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K											
IKU	Pencapaian persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang											
Satuan	Tahunan											
	2019			2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	100	75,26	75,26	80	100	100	85	100	100	90	100	100

Indikator Kinerja Utama yang ketiga adalah persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang. Persentase pelaku usaha ini dihitung berdasarkan jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut dan/atau mengajukan perizinan yang sesuai dengan alokasi pemanfaatan ruang laut berdasarkan Perda RZWP3K dibagi dengan jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut yang ada dan/atau mengajukan perizinan pemanfaatan ruang laut dikali 100 persen.



Gambar 3.3.5. Kegiatan IKU ke-3

Pencapaian persentase pelaku usaha tahun terus mengalami perbaikan, dimulai pada tahun 2019 persentase mencapai 75,26%, terus naik menjadi 100% dari target hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan partisipasi para pelaku usaha yang bergerak dalam pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil patuh terhadap perizinan berusaha, dan partisipasi masyarakat cenderung naik dan ikut berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Misi	Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama	
Tujuan	Meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut	
Sasaran	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	
IKU	Pencapaian persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	
Satuan	Tahunan	
	2024	Nasional
	Target	Realisasi 2022
	100	-

Tabel Program/kegiatan dan faktor pendukung/penghambat serta solusi:

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/Penghambat	Solusi	Aksi
<p>1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>2. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan</p>	<p>1. Bantuan sarana penanganan sampah berupa mesin press sampah untuk kelompok masyarakat di Kabupaten Pesawaran.</p> <p>2. Pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Ngambur, Pesisir Barat dan Teluk Kiluan, Tanggamus</p> <p>3. Bantuan perahu karet beserta mesin untuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di Kab. Way Kanan dan Lampung Barat pada tahun 2021, Kab. Pringsewu dan Mesuji pada tahun 2022.</p> <p>4. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan patroli laut untuk mengantisipasi kegiatan IUU Fishing, pencemaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Masih adanya IUU Fishing di Perairan Provinsi Lampung, terutama kapal-kapal yang belum memiliki dokumen perizinan dan penggunaan alat tangkap yang dilarang/ merusak. Masih terjadinya perompakan kapal nelayan terutama di Pesisir Timur Lampung.</p>	<p>Mendorong pengawasan sumber daya ikan terpadu melibatkan seluruh stake holder terkait</p>	<p>1. persiapan pelaksanaan, monitoring, pengambilan Data biofisik, ekonomi, sosial, pemantauan, pendampingan, penilaian, pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>2. persiapan pelaksanaan, verifikasi izin lokasi, rehabilitasi penangkaran penyu</p> <p>3. persiapan pelaksanaan, monitoring, pemantauan, pendampingan, penilaian, pengelolaan dengan baik</p> <p>4. Persiapan pelaksanaan, Penyediaan Operasional Patroli Laut dan Pemeliharaan Kapal Pengawasan</p> <p>5. Persiapan pelaksanaan, Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas, Monitoring, Pemantauan dan pengawasan</p>

Tabel 3.3.3. Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

No	PROGRAM	TARGET PERUBAHAN RENSTRA						REALISASI PENCAPAIAN						RASIO PENCAPAIAN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	190.155	188.790	193.509	198.347	203.306	208.388	159.916	198.968*	177.221*	159.618*	-	-	84%	105%	92%	-	-	-
		114,29	117,69	118,27	118,87	119,46	120,06	102,21	101,35	109,56	105,86	-	-	90%	87%	93%	-	-	-
II.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	118.885	191.358	205.040	223.513	239.249	265.305	181.129	105.544	182.258*	171.054*	-	-	152%	55%	89%	-	-	-
		19.435	13.634	14.485	15.404	16.396	17.468	19.436	18.32	16.396	-	-	-	100%	134%	113%	-	-	-
		95.84	97.28	98.74	100.22	101.72	103.25	100.80	100.38	101.18	101,12	-	-	105%	104%	102%	-	-	-
III.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	18.935	19.859	21.845	24.030	26.433	29.076	19.054	17.487	18.482	20.525	-	-	100%	88%	85%	-	-	-
		26.23	34.54	36.09	37.72	39.41	41.19	34.2	34.77	34,93	34,93*	-	-	130%	100%	96%	-	-	-
IV.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	70	80	85	90	95	100	100	100	100	100	-	-	75%	100%	100%	-	-	-
		106.00	192.240	231.467	270.693	309.920	349.147	162.538	167.185	170.285	-	-	-	153%	87%	74%	-	-	-
V.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
		3 lokasi	5 lokasi	7 lokasi	9 lokasi	12 lokasi	15 lokasi	3 lokasi	5 lokasi	7 lokasi	9 lokasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
VI.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	-

3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung Tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan melaksanakan program dan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah (rutin) sebanyak 1 (satu) program dengan 28 (dua puluh delapan) kegiatan; dan Urusan Wajib Kelautan dan Perikanan sebanyak 5 (lima) program dengan tiga puluh tujuh (37) kegiatan, total 6 program 65 kegiatan. Adapun anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2022, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4.1 Pagu dan Realisasi Keuangan T.A 2022

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.599.159.048	18.612.797.682	94,97
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	143.372.400	95,58
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000	63.925.400	98,35
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	60.000.000	54.747.000	91,25
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	24.700.000	98,80
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.604.605.048	14.109.318.673	96,61
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.559.605.048	14.064.684.073	96,60
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000	25.000.000	100,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000	19.634.600	98,17
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000	29.984.400	99,95
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	19.984.400	99,92
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.000.000	89.100.000	77,48
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	44.500.000	98,89
Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	30.000.000	5.600.000	18,67
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	39.000.000	97,50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.500.362.000	1.396.126.765	93,05
Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	25.000.000	24.810.000	99,24
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.362.000	178.792.500	99,13
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.994.100	99,94
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	275.000.000	274.303.100	99,75
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.985.500	99,93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	100,00
Penyediaan Bahan/ Material	60.000.000	39.951.600	66,59

Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	32.747.965	81,87
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	865.000.000	790.542.000	91,39
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	656.018.000	642.655.250	97,96
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.500.000	491.700.000,00	98,24
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.518.000	150.955.250	97,07
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.170.174.000	1.864.997.798	85,94
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	415.000.000	287.834.476	69,36
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.745.174.000	1.567.163.322	89,80
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	373.000.000	337.242.396	90,41
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	214.859.753	85,94
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	60.000.000	100,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.000.000	62.382.643	99,02
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.487.960.000	1.485.740.472	99,85
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	482.460.000	482.458.472	100,00
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	144.000.000	143.948.000	99,96
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	115.500.000	114.831.000	99,42
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	150.000.000	148.828.000	99,22
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	55.000.000	54.999.000	100,00
Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil			
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	444.000.000	443.678.000	99,93
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	97.000.000	96.998.000	100,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	18.139.536.000	17.659.635.883	97,35
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1.289.000.000	1.247.299.500	96,76
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	189.000.000	188.722.000	99,85

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	700.000.000	662.894.900	94,70
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	400.000.000	395.682.600	98,92
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.350.000.000	1.345.298.580	99,65
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.350.000.000	1.345.298.580	99,65
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	110.000.000	70.368.400	63,97
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	110.000.000	70.368.400	63,97
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	15.350.536.000	14.957.552.203	97,44
Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	162.260.000	160.760.900	99,08
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	11.656.950.000	11.447.704.800	98,20
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3.531.326.000	3.349.086.503	94,84
Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	40.000.000	39.117.200	97,79
Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	40.000.000	39.117.200	97,79
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	8.039.350.000	7.879.802.199	98,02
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	230.000.000	229.244.700	99,67
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	30.000.000	29.845.000	99,48
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	200.000.000	199.399.700	99,70
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7.809.350.000	7.650.557.499	97,97
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	68.380.000	97,69
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	900.000.000	898.775.000	99,86
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	990.000.000	967.118.000	97,69
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3.739.350.000	3.641.910.014	97,39
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.960.000.000	1.925.001.485	98,21
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.373.000	99,37

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	100,00
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	1.356.940.000	1.355.793.466	99,92
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil			
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	184.718.000	184.717.979	100,00
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	823.570.000	823.383.887	99,98
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	254.495.000	253.545.000	99,63
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	47.512.000	47.502.000	99,98
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	25.300.000	25.299.600	100,00
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	21.345.000	21.345.000	100,00
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.363.000.000	3.210.720.641	95,47
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000	24.100.000	96,40
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	275.000.000	274.393.000	99,78
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	300.000.000	290.094.940	96,70
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	1.200.000.000	1.088.780.945	90,73

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	288.000.000	259.589.756	90,14
Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.275.000.000	1.273.762.000	99,90
Total	51.985.945.048,20	50.204.490.342,92	96,57

3.5 Efektifitas dan Efisiensi

Efektifitas mengukur keberhasilan organisasi, program, dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada tahun 2022, total realisasi anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebesar Rp50.204.490.342,92,- dari target realisasi anggaran belanja sebesar Rp51.985.945.048,20,- sehingga nilai efektifitas diperoleh sebesar 96,57% menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2022 sudah efektif. Sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran (output) dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan anggaran yang tersedia, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2022 sudah melebihi target yang akan dicapai sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran sudah efisien. Efektifitas dan efisiensi terdapat dalam Tabel 3.5.1 berikut

Tabel 3.4.1 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran 2022

No	IKU Dinas	Satuan	Kinerja 2022			Anggaran			Persentase Kinerja dan Anggaran
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Misi 5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan									
1	Presentase (Pencapaian) Produksi Perikanan	%	100	100,5	100,5	45.778.045.048,2	44.152.235.763,92	96,45	1
2	Presentase (Pencapaian) Ekspor Perikanan	%	100	106,5	106,5	3.363.000.000	3.210.720.641	95,47	1
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama									
3	Pencapaian persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	90	100	100	2.844.900.000	2.841.533.938	99,88	1

3.6 Prestasi dan Inovasi

Museum Rekor-Dunia Indonesia menganugerahkan penghargaan Pemrakrsa Penyajian dan Konsumsi Rajungan Bersama Terbanyak sebesar 1 Ton kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang diterima oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi pada tanggal 18 November 2022, di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung. Kegiatan ini sekaligus memperingati HARKANNAS ke-9 dan turut mengundang Forkopimda, Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung, Dirjen KKP RI, UPT Perikanan Pusat yang berada di Provinsi Lampung, OPD se-Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kelautan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, NGO yang bergerak dibidang Perikanan. Pemecahan Rekor Muri yang dibuktikan dengan pendokumentasian jumlah rajungan yang disajikan bersama Gubernur dan Panitia Rekor Muri. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkenalkan makan rajungan ke khalayak ramai, meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Provinsi Lampung, meningkatkan daya jual produk perikanan, mendukung Agenda Kerja Utama Gubernur yaitu Nelayan Berjaya, dan sebagai keberhasilan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam penyajian terbanyak yang dicatat di Rekor MURI.



Gambar 3.4.1 Penerimaan Rekor Muri – Pemrakarsa Sajian Rajungan Terbanyak

Provinsi Lampung meraih Juara 1 pada Kategori Menu Keluarga dan Menu Kudapan, serta Harapan 1 pada Menu Balita sehingga menjadi Juara Umum pada Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-18 (yang diwakili oleh Kabupaten Pringsewu) pada Tanggal 21 November 2022. Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ini dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dapat memperkenalkan sajian khas daerah berbahan baku ikan ke khalayak ramai, meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Provinsi Lampung, meningkatkan daya jual produk perikanan dan mendukung Agenda Kerja Utama Gubernur yaitu Nelayan Berjaya.



Gambar 3.4.2 Penyerahaan Piala Juara Umum Lomba Masak Serba Ikan ke - 18

3.7 TL LHE 2022

Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mendapat predikat "B" (baik) dengan nilai 69,35. Untuk meningkatkan nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim penilai untuk ditindaklanjuti. Hasil tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Agar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP 2021 dan disampaikan laporan tindak lanjut tersebut secara tertulis.
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP 2021 dan disampaikan tindak lanjut tersebut secara tertulis.
2. Agar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung segera mengupload Laporan Kinerja Tahun 2021 pada laman Website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah meng-upload Laporan Kinerja Tahun 2021 pada laman Website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung: <https://dkp.lampungprov.go.id>. (bukti tangkapan layar terlampir)

The screenshot shows the website interface for 'Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung'. The main heading is 'LAPORAN KINERJA (LKJ)'. Below the heading, there is a table with the following content:

Kategori	Title Content	File
Laporan Kinerja (LKJ)	Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Download

On the right side, there is a sidebar menu with the following items:

- LAPORAN KINERJA (LKJ)
- DOKUMEN RENSTRA
- DOKUMEN RENJA
- LAPORAN RIKT
- RENCANA AKSI
- EVALUASI RENC. AKSI
- PK MURNI
- PK APBD PERUBAHAN
- SK IKU
- SK RENSTRA
- IKU
- EVALUASI PROGRAM
- LAP. PENCAPAIAN KINERJA
- LAPORAN KINERJA
- RINGKASAN DPA-SKPD

- Agar Penanggungjawab pelaksana kegiatan membuat laporan yang mengungkapkan seluruh informasi pencapaian kinerja, sebagaimana akan digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi tahun berikutnya.
 - Akan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja, sebagai forum penyampaian informasi capaian kinerja di masing-masing bidang/ updt serta bahan masukan dan evaluasi dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi tahun berikutnya

B A B IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governace) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Pembuatan LKJ ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Indikator kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada tahun 2022 (Perubahan) mempunyai capaian sebagai berikut:

- 1) Prosentase pencapaian produksi perikanan adalah 100,5% (330.673,22 ton *angka sementara)
- 2) Prosentase pencapaian ekspor perikanan adalah 106,5% (20.525,48 ton)
- 3) Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang adalah 100% telah mengajukan rekomendasi perizinan.

Dari hasil pengukuran terhadap kinerja pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, rata-rata pecapaian sasaran strategis adalah 102,3 atau sangat baik/tinggi.

Pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung didukung oleh anggaran pembangunan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang meliputi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Anggaran Belanja Aparatur/Gaji). Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh Total Anggaran APBD sebesar Rp 49.881.047.684,20,- yang terdiri dari belanja langsung (Program dan Kegiatan) sebesar Rp 35.484.500.000,- dan belanja tidak langsung (Gaji Pegawai) sebesar Rp 14.396.574.684,20,-. Pada APBD Perubahan mengalami penyesuaian menjadi Rp 51.985.945.048,20,- yang terdiri dari belanja langsung (Program dan Kegiatan) sebesar Rp 37.426.340.000 dan belanja tidak langsung (Gaji Pegawai) sebesar Rp 14.559.605.048,20. Realisasi untuk belanja langsung mencapai Rp 36.139.806.269,92,- (96,56%) dan realisasi untuk belanja tidak langsung mencapai Rp 14.064.684.073,- (96,6%). Untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022, target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 1.524.193.000,- dan terealisasi penerimaan per bulan Desember 2022 sebesar Rp 1.197.688.640,-. (78,58%). Realisasi PAD terbesar berasal dari Retribusi Perizinan Tertentu, yang terealisasi sebesar 105,91% dari target.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah 96,57% dari anggaran yang direncanakan. Hal ini

menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah optimal dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunya Laporan Analisis Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikana gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai Stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Banda Lampung, 17 Maret 2023

Kepala Dinas



Ir. Liza Herli, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680812 199903 2 003

MATRIKS RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TARGET	Rp. (000)		
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				PROGRAM																
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	3.25.03	I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1). Produksi Perikanan Tangkap (ton)	142.840	188.790,09	10.039.800	151.869,90	8.964.789	159.463,40	8.999.288	167.441,57	7.150.000	184.185,72	7.150.000	184.185,72	42.303.877	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Lampung
					2). Nilai Tukar Nelayan (NTN)	117,10	117,69	103,47	103,99	104,51	105,03	105,03	105,03	105,03	105,03	105,03	105,03	105,03		
				KEGIATAN																
			3.25.03.1.01	I. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		3 kegiatan	800.000	3 kegiatan	1.100.000	3 kegiatan	1.450.000	3 kegiatan	1.200.000	3 kegiatan	1.200.000	3 kegiatan	5.750.000		Provinsi Lampung
			3.25.03.1.01.01	1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah		1 dokumen	300.000	1 dokumen	300.000	1 dokumen	300.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	1.300.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.01.02	2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah		100 unit	300.000	100 unit	500.000	100 unit	750.000	100 unit	600.000	100 unit	600.000	100 unit	2.750.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.01.03	3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah		1000 unit	200.000	1000 unit	300.000	1200 unit	400.000	1500 unit	400.000	1500 unit	400.000	1500 unit	1.700.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.02	II Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		3 kegiatan	800.000	3 kegiatan	1.250.000	3 kegiatan	1.250.000	3 kegiatan	650.000	3 kegiatan	650.000	3 kegiatan	4.600.000		Provinsi Lampung
			3.25.03.1.02.01	4 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat		1 dokumen	300.000	1 dokumen	450.000	1 dokumen	450.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	1.400.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.02.02	5 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah		100 unit	300.000	100 unit	500.000	100 unit	500.000	100 unit	350.000	100 unit	350.000	100 unit	2.000.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.02.03	6 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah		100 unit	200.000	100 unit	300.000	100 unit	300.000	100 unit	200.000	100 unit	200.000	100 unit	1.200.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.03	III Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap yang diterbitkan		200 Nelayan	175.000	400 Nelayan	175.000	500 Nelayan	175.000	500 Nelayan	100.000	500 Nelayan	100.000	500 Nelayan	500.000		Provinsi Lampung
			3.25.03.1.03.01	7 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap unuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT samapi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	75.000	1 dokumen	75.000	1 dokumen	75.000	-	-	-	-	1 dokumen	225.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.03.02	8 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	300 Nelayan	200 rekomendasi	100.000	250 rekomendasi	100.000	300 rekomendasi	100.000	300 rekomendasi	100.000	350 rekomendasi	100.000	350 rekomendasi	500.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.06	IV Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola		4 Pelabuhan	8.189.800	4 Pelabuhan	6.364.789	4 Pelabuhan	6.049.288	4 Pelabuhan	5.100.000	4 Pelabuhan	5.100.000	4 Pelabuhan	30.803.877		Provinsi Lampung
			3.25.03.1.06.01	9 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	20 Lokasi	2 Pelabuhan	100.000	3 Pelabuhan	100.000	3 Pelabuhan	100.000	3 Pelabuhan	100.000	3 Pelabuhan	100.000	3 Pelabuhan	500.000	Bid. PT	Kab/Kota Pesisir
			3.25.03.1.06.02	10 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Pelabuhan	5 unit	4.193.000	5 unit	3.964.789	8 unit	3.849.288	8 unit	3.500.000	10 unit	3.500.000	10 unit	19.007.077	Bid. PT	Kab/Kota Pesisir
			3.25.03.1.06.03	11 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana di PPP Lempassing	1 PPP	1 layanan	1.000.000	1 layanan	700.000	1 layanan	700.000	1 layanan	500.000	1 layanan	500.000	1 layanan	3.400.000	UPTD PP	Lempassing
					Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana di PPP Labuhan	2 PPP	2 layanan	946.800	2 layanan	900.000	2 layanan	700.000	2 layanan	500.000	2 layanan	500.000	2 layanan	3.546.800	UPTD PP	Labuhan Meringgai & Teladas
					Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana di PPP Kota Agung	1 PPP	1 layanan	1.950.000	1 layanan	700.000	1 layanan	700.000	1 layanan	500.000	1 layanan	500.000	1 layanan	4.350.000	UPTD PP	Kota Agung
			3.25.03.1.09	V Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Jumlah Kegiatan mendukung Pendaftaran Kapal Perikanan di		1 kegiatan	75.000	1 kegiatan	75.000	1 kegiatan	75.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	425.000		Provinsi Lampung
			3.25.03.1.09.02	12 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan		100 Rekomendasi	75.000	100 Rekomendasi	75.000	100 Rekomendasi	75.000	100 Rekomendasi	100.000	100 Rekomendasi	100.000	100 Rekomendasi	425.000	Bid. PT	Provinsi Lampung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi	
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TARGET	Rp. (000)			
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					
							(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
				PROGRAM																	
			3.25.04	ii. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1). Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 2). Jumlah benih (juta ekor) 3). Nilai Tukar Pembudidaya (NTP)	160.582,92 12.209,47 95,84	191.358,54 13.634,44 97,28	4.175.000	161.588,70 14.485,19 98,74	4.925.000	169.668,14 15.404,01 100,22	4.725.000	187.442,89 16.396,33 101,72	5.225.000	206.995,13 17.468,03 103,25	7.075.000	206.995,13 17.468,03 103,25				
				KEGIATAN																	
			3.25.04.1.01	1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan (dokumen)		1 0 dokumen	275.000	1 0 dokumen	275.000	1 0 dokumen	275.000	1 0 dokumen	275.000	1 5 dokumen	275.000	55 dokumen	1.375.000		Provinsi Lampung	
			3.25.04.1.01.01	1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		1 rekomendasi	100.000	1 rekomendasi	100.000	3 rekomendasi	100.000	3 rekomendasi	75.000	3 rekomendasi	75.000	3 rekomendasi	450.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung	
			3.25.04.1.01.02	2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		3 rekomendasi	75.000	5 rekomendasi	75.000	5 rekomendasi	75.000	5 rekomendasi	100.000	5 rekomendasi	100.000	5 rekomendasi	425.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung	
			3.25.04.1.01.03	3. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan		1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	500.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung	
			3.25.04.1.05	ii. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut		7 kegiatan	3.900.000	7 kegiatan	4.650.000	7 kegiatan	4.450.000	7 kegiatan	4.950.000	7 kegiatan	6.800.000	7 kegiatan	24.750.000		Provinsi Lampung	
			3.25.04.1.05.01	4. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	500.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung	
			3.25.04.1.05.02	5. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		5	20 unit	1.000.000	20 unit	1.000.000	20 unit	1.000.000	20 unit	1.000.000	20 unit	1.000.000	20 unit	5.000.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.04.1.05.03	6. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan (paket)		200	30 paket	1.500.000	30 paket	2.000.000	30 paket	1.500.000	30 paket	1.500.000	30 paket	1.000.000	120 paket	7.500.000	UPTD BBI	Provinsi Lampung
			3.25.04.1.05.04	7. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		1	1 unit	300.000	2 unit	500.000	2 unit	500.000	2 unit	1.000.000	2 unit	1.600.000	2 unit	3.900.000	UPTD BBI	Tanggamus, Lampung Timur
			3.25.04.1.05.05	8. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang disediakan (unit)		15	15 unit	750.000	15 unit	750.000	15 unit	1.000.000	15 unit	1.000.000	15 unit	2.750.000	75 unit	6.250.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.04.1.05.06	9. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat		15	15 dokumen	100.000	15	150.000	15 dokumen	150.000	15 dokumen	150.000	15 dokumen	150.000	75 dokumen	700.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.04.1.05.07	10. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pembudidaya ikan yang dibina/ meningkat kompetensinya (pembudidaya)		1	25 orang	150.000	25 orang	150.000	25 orang	200.000	25 orang	200.000	25 orang	200.000	25 orang	900.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi	
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TARGET	Rp. (000)			
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				PROGRAM																	
	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase Pencapaian ekspor perikanan	3.25.06	iii. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1). Volume Ekspor Perikanan (kg)	##### #####	19.859.765	2.030.000	18.361.350	2.550.000	19.279.418	2.325.000	20.725.374	2.900.000	22.797.911	3.000.000	22.797.911	12.805.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung	
					2). Konsumsi Ikan penduduk (Kg/Kap/Thn)		32,20	34,54	36,09		37,72		39,41		41,19		41,19				
				KEGIATAN																	
			3.25.06.1.01	i. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15	350.000	20	350.000	25	450.000	25	450.000	25	500.000	25	2.100.000		Provinsi Lampung	
			3.25.06.1.01.01	1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses		1 rekomendasi	100.000	1 rekomendasi	100.000	1 rekomendasi	100.000	1 rekomendasi	100.000	1 rekomendasi	100.000	5 rekomendasi	500.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung	
			3.25.06.1.01.02	2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		5 rekomendasi	150.000	5 rekomendasi	150.000	5 rekomendasi	200.000	5 rekomendasi	200.000	5 rekomendasi	200.000	25 rekomendasi	900.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung	
			3.25.06.1.01.03	3. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala		1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	700.000	APHP	Provinsi Lampung	
			3.25.06.1.02	ii. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		2 kegiatan	740.000	2 kegiatan	1.000.000	2 kegiatan	625.000	2 kegiatan	1.000.000	2 kegiatan	1.000.000	2 kegiatan	4.365.000		Provinsi Lampung	
			3.25.06.1.02.01	4. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha		30 unit usaha	300.000	30 unit usaha	450.000	30 unit usaha	75.000	30 unit usaha	450.000	30 unit usaha	450.000	30 unit usaha	1.725.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung	
			3.25.06.1.02.02	5. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan,		15 unit usaha	440.000	15 unit usaha	550.000	15 unit usaha	550.000	15 unit usaha	550.000	15 unit usaha	550.000	75 unit usaha	2.640.000	UPTD LPHP	Provinsi Lampung	
			3.25.06.1.03	iii. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		3 kegiatan	940.000	3 kegiatan	1.200.000	3 kegiatan	1.250.000	3 kegiatan	1.450.000	3 kegiatan	1.500.000	3 kegiatan	6.340.000		Provinsi Lampung	
			3.25.06.1.03.01	6. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1 dokumen	300.000	1 dokumen	450.000	1 dokumen	250.000	1 dokumen	450.000	1 dokumen	450.000	1 dokumen	1.900.000	UPTD LPHP	Provinsi Lampung	
			3.25.06.1.03.02	7. Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi		1.500	10 unit usaha	440.000	10 unit usaha	550.000	10 unit usaha	750.000	10 unit usaha	750.000	10 unit usaha	750.000	50 unit usaha	3.240.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.06.1.03.03	8. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai		1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	250.000	1 dokumen	250.000	1 dokumen	300.000	1 dokumen	1.200.000	APHP	Provinsi Lampung	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi	
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TARGET	Rp. (000)			
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
PROGRAM																					
Meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan	3.25.02	IV	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1). Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi 2). Luas kawasan konservasi peraliran, pesisir dan pulau kecil (ha)	NA	80	1.825.000	85	1.242.819	90	1.487.460	95	950.000	100	750.000	100	6.255.279	Bid PRL	Provinsi Lampung
						106.000		192.240		231.467		270.693		309.920		349.147		349.147			
KEGIATAN																					
			3.25.02.1.01	I	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		4 kegiatan	1.325.000	4 kegiatan	844.118	4 kegiatan	891.460	4 kegiatan	600.000	4 kegiatan	400.000	4 kegiatan	4.060.578		Provinsi Lampung
			3.25.02.1.01.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final	1 dokumen	2 dokumen	375.000	2 dokumen	192.694	2 dokumen	482.460	2 dokumen	300.000	2 dokumen	100.000	2 dokumen	1.450.154	Bid PRL	Provinsi Lampung
			3.25.02.1.01.02	2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	106.000	192.240	350.000	231.467	71.424	270.693	144.000	309.920	100.000	349.147	100.000	349.147	765.424	Bid PRL	Provinsi Lampung
			3.25.02.1.01.03	3	Rahabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi		10 ha	450.000	10 ha	580.000	10 ha	115.000	10 ha	100.000	10 ha	100.000	10 ha	1.345.000	Bid PRL	Kab/Kota Pesisir
			3.25.02.1.01.04	4	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program		30 orang	150.000	30 orang	-	30 orang	150.000	60 orang	100.000	60 orang	100.000	60 orang	500.000	Bid PRL	Kab/Kota Pesisir
			3.25.02.1.02	II	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (dokumen)		10	200.000	10	35.884	10	55.000	15	100.000	15	100.000	60	490.884		Provinsi Lampung
			3.25.02.1.02.01	5	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi		2 rekomendasi	100.000	2 rekomendasi	35.884	2 rekomendasi	-	2 rekomendasi	50.000	2 rekomendasi	50.000	2 rekomendasi	235.884	Bid PRL	Provinsi Lampung
			3.25.02.1.02.02	6	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan		10 rekomendasi	100.000	10 rekomendasi	-	10 rekomendasi	55.000	10 rekomendasi	50.000	10 rekomendasi	50.000	10 rekomendasi	255.000	Bid PRL	Provinsi Lampung
			3.25.02.1.03	III	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		2 kegiatan	300.000	2 kegiatan	362.817	2 kegiatan	541.000	2 kegiatan	250.000	2 kegiatan	250.000	2 kegiatan	1.703.817		Provinsi Lampung
			3.25.02.1.03.01	7	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		30 orang	150.000	30 orang	220.200	30 orang	444.000	50 orang	150.000	50 orang	150.000	50 orang	1.114.200	Bid PRL	Provinsi Lampung
			3.25.02.1.03.02	8	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan		3 kelompok	150.000	3 kelompok	142.617	3 kelompok	97.000	5 kelompok	100.000	5 kelompok	100.000	5 kelompok	589.617	Bid PRL	Provinsi Lampung
PROGRAM																					
			3.25.05	V	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	1). Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan 2). Jumlah Hari Operasi	100	18	1.800.000	100	1.900.000	100	2.000.000	100	1.900.000	100	1.900.000	100	9.500.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
								18		24		30		35		40		40			
KEGIATAN																					
			3.25.05.1.01	I	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil		4 kegiatan	1.350.000	4 kegiatan	1.300.000	4 kegiatan	1.400.000	4 kegiatan	1.300.000	4 kegiatan	1.300.000	4 kegiatan	6.650.000		Provinsi Lampung
			3.25.05.1.01.01	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		20 dokumen	150.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	100 dokumen	950.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
			3.25.05.1.01.02	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2 unit	20 dokumen	850.000	20 dokumen	600.000	20 dokumen	600.000	20 dokumen	600.000	20 dokumen	600.000	100 dokumen	3.250.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
			3.25.05.1.01.03	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 MIL	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di	NA	20 dokumen	150.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	100 dokumen	950.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
			3.25.05.1.01.04	4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	15 pokmaswas	18 pokmaswas	200.000	21 pokmaswas	300.000	24 pokmaswas	400.000	27 pokmaswas	300.000	30 pokmaswas	300.000	30 pokmaswas	1.500.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TARGET	Rp.(000)		
							TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)				
							(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			3.25.05.1.02	II Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan		3 kegiatan	450.000	3 kegiatan	600.000	3 kegiatan	600.000	3 kegiatan	600.000	3 kegiatan	600.000	3 kegiatan	2.850.000		Provinsi Lampung
			3.25.05.1.02.01	5 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai	NA	20 dokumen	150.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	100 dokumen	950.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
			3.25.05.1.02.02	6 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	NA	20 dokumen	150.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	100 dokumen	950.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
			3.25.05.1.02.03	6 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	NA	20 dokumen	150.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	20 dokumen	200.000	100 dokumen	950.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
PROGRAM																				
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Meningkatnya penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan min C	Laporan Akuntabilitas Kinerja dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan min C	03.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	19.623.030	100%	18.443.062	100%	19.645.147	100%	18.475.000	100%	18.575.000	100%	94.071.239	Sekretariat	Provinsi Lampung
KEGIATAN																				
			3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan	100%	300.000	100%	247.081	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	997.081		Provinsi Lampung
			3.25.01.1.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dokumen	100.000	6 dokumen	193.000	6 dokumen	65.000	6 dokumen	50.000	6 dokumen	50.000	6 dokumen	458.000	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.01.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		3 dokumen	100.000	3 dokumen	-	3 dokumen	60.000	3 dokumen	50.000	3 dokumen	50.000	3 dokumen	260.000	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.01.07	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 laporan	100.000	6 laporan	54.081	6 laporan	25.000	6 laporan	50.000	6 laporan	50.000	6 laporan	279.081	Sekretariat	Provinsi Lampung
KEGIATAN																				
			3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	15.058.030	100%	14.275.870	100%	14.441.547	100%	14.545.000	100%	14.545.000	100%	14.545.000	72.865.447		Provinsi Lampung
			3.25.01.1.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	132 Orang/ Bulan	14.858.030	122 Orang/ Bulan	14.228.870	122 Orang/ Bulan	14.396.547	125 Orang/ Bulan	14.500.000	130 Orang/ Bulan	14.500.000	130 Orang/ Bulan	14.500.000	72.483.447	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.02.03	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dokumen	100.000	1 dokumen	20.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	195.000	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.02.04	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		17 dokumen	100.000	17 dokumen	27.000	17 dokumen	20.000	17 dokumen	20.000	17 dokumen	20.000	17 dokumen	187.000	Sekretariat	Provinsi Lampung
KEGIATAN																				
			3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	40.000	100%	20.000	100%	30.000	100%	35.000	100%	40.000	100%	40.000	75.000		Bandar Lampung
			3.25.01.1.03.05	1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Barang Milik Daerah pada SKPD		3 dokumen	20.000	3 dokumen	10.000	3 dokumen	20.000	3 dokumen	20.000	3 dokumen	20.000	3 dokumen	90.000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.03.06	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		3 dokumen	20.000	3 dokumen	10.000	3 dokumen	10.000	3 dokumen	15.000	3 dokumen	20.000	3 dokumen	75.000	Sekretariat	Bandar Lampung
KEGIATAN																				
			3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	200.000	100%	59.800	100%	115.000	100%	115.000	100%	190.000	100%	190.000	679.800		Provinsi Lampung
KEGIATAN																				
			3.25.01.1.05.02	1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		-	-	-	-	-	-	-	185 stel	75.000	185 stel	75.000	75.000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.05.09	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	6 orang	100.000	6 orang	14.000	6 orang	45.000	6 orang	45.000	6 orang	45.000	6 orang	45.000	249.000	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.05.10	3 Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	60 orang	50.000	60 orang	27.800	60 orang	30.000	75 orang	30.000	75 orang	30.000	75 orang	30.000	167.800	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.05.11	4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	50 orang	50.000	50 orang	18.000	50 orang	40.000	75 orang	40.000	75 orang	40.000	75 orang	40.000	188.000	Sekretariat	Bandar Lampung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TARGET	Rp. (000)		
							TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				KEGIATAN																
			3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD		100%	1.570.000	100%	1.436.415	100%	1.448.082	100%	1.200.000	100%	1.200.000	100%	6.854.497	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.06.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		20 paket	25.000	20 paket	16.810	20 paket	25.000	20 paket	25.000	20 paket	25.000	20 paket	116.810	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 paket	40.000	5 paket	31.654	5 paket	98.082	5 paket	40.000	5 paket	40.000	5 paket	249.736	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20 paket	20.000	20 paket	15.000	20 paket	20.000	20 paket	20.000	20 paket	20.000	20 paket	95.000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.04	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	350.000	1 paket	422.943	1 paket	275.000	1 paket	250.000	1 paket	250.000	1 paket	1.547.943	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.05	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5 paket	20.000	5 paket	20.000	5 paket	20.000	5 paket	20.000	5 paket	20.000	5 paket	100.000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5 dokumen	25.000	5 dokumen	22.688	5 dokumen	25.000	5 dokumen	25.000	5 dokumen	25.000	5 dokumen	122.688	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.07	7 Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		10 paket	50.000	10 paket	38.160	10 paket	80.000	10 paket	80.000	10 paket	80.000	10 paket	328.160	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.08	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	40.000	12 Laporan	35.000	12 Laporan	40.000	12 Laporan	40.000	12 Laporan	40.000	12 Laporan	195.000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.09	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		72 Laporan	1.000.000	72 Laporan	834.160	72 Laporan	865.000	72 Laporan	700.000	72 Laporan	700.000	72 Laporan	4.099.160	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.07	KEGIATAN																
			3.25.01.1.07.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100%	430.000	100%	317.939	100%	655.518	100%	300.000	100%	300.000	100%	1.403.457		Bandar Lampung
			3.25.01.1.07.06	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan		-	-	-	-	-	500.000	1 unit	50.000	1 unit	50.000	2 unit	600.000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.07.06	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 unit	250.000	10 unit	317.939	10 unit	155.518	10 unit	150.000	10 unit	150.000	10 unit	1.023.457	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.07.10	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		10 unit	180.000	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	100.000	10 unit	100.000	10 unit	380.000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.08	KEGIATAN																
			3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.545.000	100%	1.853.457	100%	2.005.000	100%	1.680.000	100%	1.700.000	100%	8.783.457	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.08.02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	470.000	12 Laporan	365.237	12 Laporan	425.000	12 Laporan	400.000	12 Laporan	400.000	12 Laporan	2.060.237	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.08.03	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Laporan	75.000	12 Laporan	25.000	12 Laporan	30.000	12 Laporan	30.000	12 Laporan	50.000	12 Laporan	210.000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.08.04	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.463.220	12 Laporan	1.550.000	12 Laporan	1.250.000	12 Laporan	1.250.000	12 Laporan	6.513.220	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.09	KEGIATAN																
			3.25.01.1.09.02	1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		1 tahun	480.000	1 tahun	232.500	1 tahun	800.000	1 tahun	450.000	1 tahun	450.000	1 tahun	2.412.500		Bandar Lampung
			3.25.01.1.09.02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		25 unit	250.000	25 unit	200.000	25 unit	250.000	25 unit	250.000	25 unit	250.000	25 unit	1.200.000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.09.09	2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	180.000	2 unit	7.500	2 unit	500.000	2 unit	150.000	2 unit	150.000	2 unit	987.500	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.09.10	3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		10 unit	50.000	10 unit	25.000	10 unit	50.000	10 unit	50.000	10 unit	50.000	10 unit	225.000	Sekretariat	Bandar Lampung
			72					39.972.830		38.258.170		39.981.895		37.050.000		38.900.000		194.162.895		